



BAB V

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Inflasi

Angka inflasi Kabupaten Bintan selama ini masih mengacu pada angka inflasi Kota Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan pengumpulan data yang dilakukan untuk mengukur inflasi hanya ada pada daerah yang berstatus perkotaan. Tanjungpinang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bintan dan mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kabupaten Bintan. Oleh karena itu angka inflasi Kabupaten Bintan masih merujuk pada angka inflasi Kota Tanjungpinang.

Pada tahun 2017, inflasi *year on year* kota Tanjungpinang adalah sebesar 3,37 persen. Setiap bulannya, inflasi kota Tanjungpinang berkisar antara -0,64 persen sampai dengan 0,97 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari, dan terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu deflasi sebesar 0,64 persen. Selama tahun 2017, ketujuh kelompok pengeluaran yang menyusun IHK Kota Tanjungpinang telah mengalami inflasi.

Tabel 5.1.1. Perkembangan Inflasi Kota Tanjungpinang, 2015-2017 (2012=100)

Kelompok	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Umum	2,46	3,06	3,37
1. Bahan Makanan	5,65	4,99	4,18
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	6,76	5,56	4,46
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	1,24	2,45	3,17
4. Sandang	5,73	3,26	0,02
5. Kesehatan	3,52	4,67	0,83
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	1,48	2,12	3,61
7. Transportasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-6,21	-2,40	2,92

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Dilihat dari sumbangan/andil inflasi selama tahun 2017, kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi sebesar 1,03 persen dan merupakan penyumbang inflasi terbesar dibandingkan enam kelompok lainnya. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar kedua selama tahun 2017 yaitu sebesar 0,87 persen. Sementara andil inflasi kelompok lainnya antara lain: kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,80 persen; kelompok sandang memberikan andil sebesar 0,00 persen; kelompok kesehatan 0,04 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,22 persen. Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil sebesar 0,41 persen (Lihat Tabel 5.1.2). Sementara itu, sepuluh jenis komoditas yang dominan menyumbang inflasi Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel 5.1.3.

Tabel 5.1.2. Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Tanjungpinang, 2017

Kelompok Pengeluaran	Andil Inflasi
(1)	(2)
1. Bahan Makanan	1,03
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,87
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	0,80
4. Sandang	0,00
5. Kesehatan	0,04
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	0,22
7. Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,41

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Tabel 5.1.3. Sumbangan Beberapa Komoditas yang Dominan Terhadap Inflasi Kota Tanjungpinang selama 2017

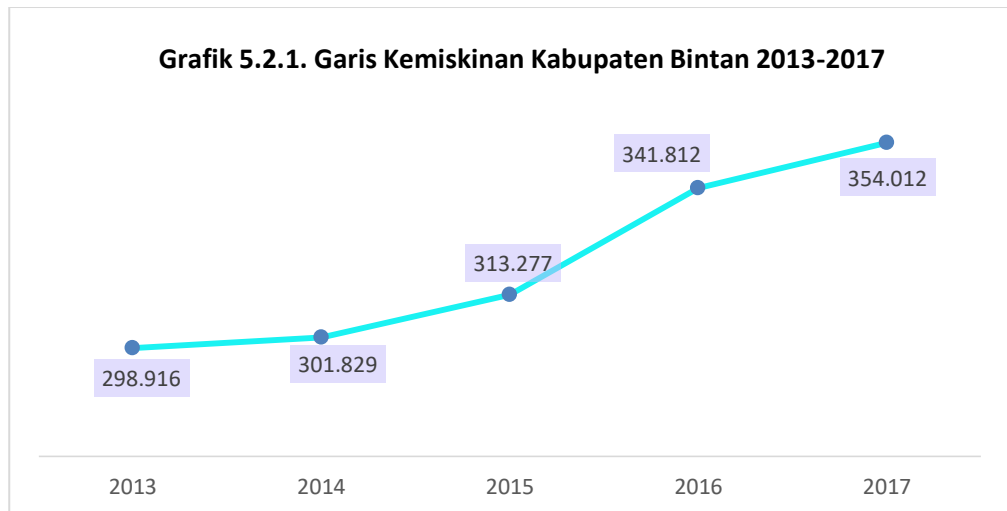
Komoditas		Andil Inflasi (%)
(1)		(2)
1	Tarif Listrik	0,50
2	Ikan Selar	0,43
3	Rokok Kretek Filter	0,28
4	Bawang Merah	0,26
5	Tarif Pulsa Ponsel	0,19
6	Rokok Putih	0,15
7	Rokok Kretek	0,14
8	Ikan Tongkol	0,12
9	Upah Tukang Bukan Mandor	0,11
10	Bensin	0,11

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

5.2 Kemiskinan

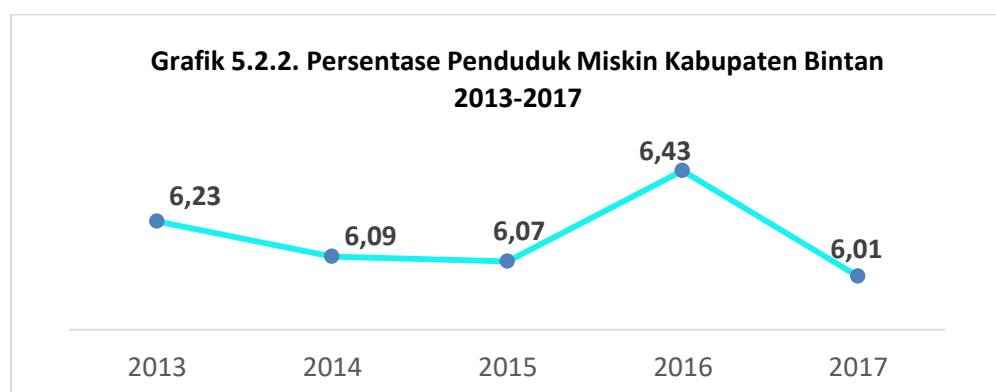
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dapat diukur melalui: garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Grafik 5.2.1 dibawah ini menunjukkan perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bintan periode 2013-2017.



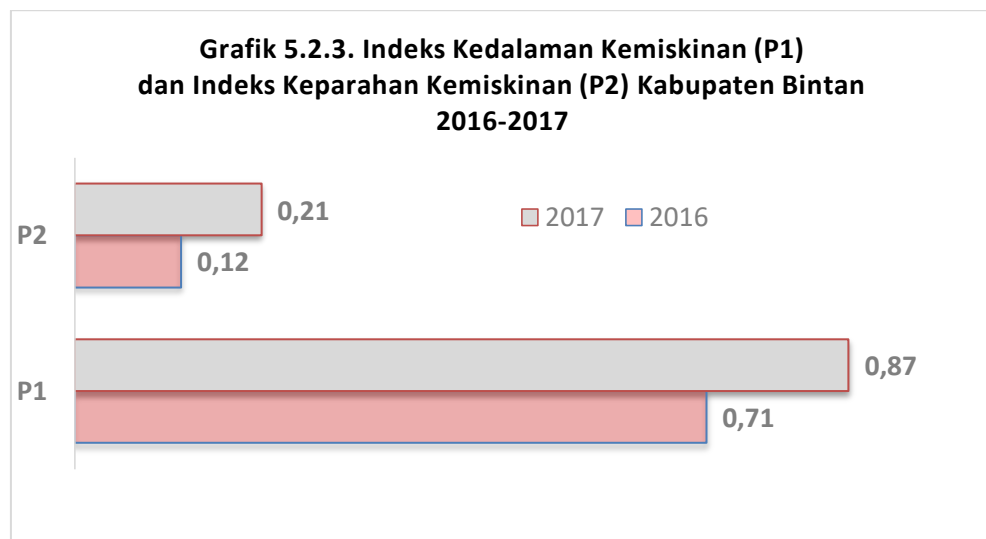
Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Pada tahun 2013 garis kemiskinan Kabupaten Bintan adalah sebesar Rp 298.916,-; artinya penduduk dengan pengeluaran perbulan dibawah Rp 298.916,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan maupun non makanan tergolong kategori penduduk miskin. Pada tahun 2017 Garis Kemiskinan Kabupaten Bintan naik sebesar Rp 12.200,- dari tahun 2016. Peningkatan Garis Kemiskinan ini salah satunya dipengaruhi oleh inflasi barang konsumsi. Garis Kemiskinan ini juga erat kaitannya dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan. Dilihat dari Grafik 5.2.2 persentase penduduk miskin di Kabupaten Bintan semakin menurun dari tahun 2013 sampai 2015, tetapi pada 2016 meningkat menjadi 6,43 persen. Kemudian pada tahun 2017, penduduk miskin di Kabupaten Bintan turun menjadi 6,01 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Selain persentase penduduk miskin, garis kemiskinan juga merupakan acuan dalam penghitungan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Pada tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2016 adalah 0,71 dan pada 2017 naik menjadi 0,87. Artinya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Bintan dari garis kemiskinan. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,12 menjadi 0,21 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

5.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Bintan menurut kategori dirinci menjadi 17 kategori/lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan setiap tahunnya, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (*base year*). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan struktur ekonomi secara nominal sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan perubahan ekonomi secara riil. Pada Tabel 5.3.1 dapat dilihat bahwa secara umum nilai nominal PDRB Kabupaten Bintan tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

Tabel 5.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	749,71	863,47	986,54	1 129,54	1 217,95
B	Pertambangan dan Penggalan	2 047,84	2 062,28	1 995,12	1 856,39	1 650,77
C	Industri Pengolahan	4 772,18	5 416,88	6 058,19	6 780,54	7 632,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,90	17,96	18,64	21,92	24,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,14	7,90	8,72	9,64	10,43
F	Konstruksi	1 906,39	2 201,93	2 503,21	2 953,20	3 342,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 049,93	1 170,38	1 314,17	1 479,54	1 696,23

H	Transportasi dan Pergudangan	251,13	293,30	343,47	398,82	454,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	598,26	696,55	818,81	957,35	1 112,66
J	Informasi dan Komunikasi	155,14	168,52	180,69	193,80	218,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	189,79	211,04	236,26	268,70	306,79
L	Real Estat	133,93	149,35	166,98	188,52	211,28
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,13	0,14	0,15	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	285,74	334,34	386,33	446,27	515,56
P	Jasa Pendidikan	232,11	260,90	292,99	330,52	381,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,99	126,30	142,16	161,25	183,76
R,S,T, U	Jasa Lainnya	24,17	26,22	28,60	30,22	33,56
Produk Domestik Regional Bruto		12 532,52	14 007,53	15 481,09	17 206,43	18 993,96

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Mulai tahun 2014 penghitungan PDRB mengalami perubahan tahun dasar menjadi 2010=100. Hal ini dikarenakan banyaknya perubahan struktur ekonomi tahun dasar 2000=100 yang dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Tabel 5.3.2 dibawah ini menyajikan PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 5.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	643,37	689,79	734,45	783,90	822,20
B	Pertambangan dan Penggalian	1 819,56	1 767,19	1 685,79	1 585,12	1 361,57
C	Industri Pengolahan	4 046,39	4 344,45	4 590,66	4 868,47	5 223,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,42	15,69	16,29	18,70	19,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,63	7,09	7,57	7,99	8,41
F	Konstruksi	1 546,36	1 712,88	1 857,70	2 089,84	2 291,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,04	1 014,48	1 101,42	1 194,54	1 289,83
H	Transportasi dan Pergudangan	221,80	242,42	265,11	287,51	311,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	503,71	547,91	597,56	650,93	708,29
J	Informasi dan Komunikasi	155,36	166,03	174,62	183,76	194,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174,21	188,95	204,65	222,18	239,75
L	Real Estat	119,38	127,61	136,57	147,74	158,65
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	238,50	257,40	277,04	298,55	321,07
P	Jasa Pendidikan	200,25	212,79	226,72	242,28	259,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,73	107,63	114,34	121,81	129,92
R,S, T,U	Jasa Lainnya	21,00	21,86	22,71	23,45	25,12
Produk Domestik Regional Bruto		10 741,92	11 424,37	12 013,39	12 726,96	13 364,82

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Bintan

5.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Indikator ini pada umumnya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan percepatan pembangunan di daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2013-2017 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan rata-rata mengalami fluktuasi. Hal ini telah diprediksi dari sektor yang sangat mempengaruhi PDRB secara total yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan, mengalami pertumbuhan yang negatif. Dimana pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang peraturan pertambangan dan penggalan. Barang-barang tambang dan hasil galian tidak boleh di ekspor keluar daerah tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu akibatnya banyak perusahaan pertambangan dan penggalan di Kabupaten Bintan yang tutup. Namun pada tahun 2017, melihat pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalan masih negatif, pertumbuhan PDRB kabupaten Bintan juga mengalami perlambatan menjadi 5,01 persen. Angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5.3.1.1.

Tabel 5.3.1.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bintan
Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016 *	2017 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,50	7,21	6,47	6,73	4,89
B	Pertambangan dan Penggalan	4,45	-2,88	-4,61	-5,97	-14,10
C	Industri Pengolahan	5,02	7,37	5,67	6,05	7,28
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	8,80	3,81	14,77	6,93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,65	6,97	6,76	5,52	5,31
F	Konstruksi	9,11	10,77	8,45	12,50	9,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,42	9,08	8,57	8,45	7,98
H	Transportasi dan Pergudangan	8,72	9,30	9,36	8,45	8,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,29	8,77	9,06	8,93	8,81
J	Informasi dan Komunikasi	4,52	6,87	5,17	5,24	5,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,85	8,46	8,31	8,56	7,91
L	Real Estat	5,57	6,89	7,02	8,18	7,38
M,N	Jasa Perusahaan	5,28	5,32	3,81	4,64	3,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,51	7,92	7,63	7,76	7,55
P	Jasa Pendidikan	4,94	6,26	6,55	6,86	6,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	6,85	6,23	6,53	6,66
R,S,T, U	Jasa Lainnya	3,66	4,09	3,87	3,24	7,16
	Produk Domestik Regional Bruto	6,08	6,35	5,16	5,94	5,01

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Perekonomian Kabupaten Bintan pada tahun 2017 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen, mengalami perlambatan 0,93 persen

dibanding tahun sebelumnya. Keadaan ini disebabkan oleh semakin berkurangnya nilai produksi untuk kategori Pertambangan dan Penggalian dimana terjadi penurunan ekonomi yang signifikan sebesar -14,10 persen. Hal ini juga terlihat pada laju pertumbuhan kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang semula pada tahun 2016 sebesar 14,77 persen melambat signifikan menjadi 6,93 persen pada tahun 2017. Kategori Konstruksi menempati urutan pertama pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dibanding kategori lainnya. Selanjutnya, kategori dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,81 persen) dan disusul Kategori Transportasi dan Pergudangan (8,42 persen).

5.3.2 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha

Besaran kontribusi masing-masing kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Tabel 5.3.2.1. Kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Bintan dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu disokong oleh Kategori Industri Pengolahan, Konstruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kontribusi PDRB ketiga kategori tersebut selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 5.3.2.1
Kontribusi PDRB Kabupaten Bintan
Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,98	6,16	6,37	6,56	6,41
B	Pertambangan dan Penggalian	16,34	14,72	12,89	10,79	8,69
C	Industri Pengolahan	38,08	38,67	39,13	39,41	40,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13	0,12	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
F	Konstruksi	15,21	15,72	16,17	17,16	17,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,38	8,36	8,49	8,60	8,93
H	Transportasi dan Pergudangan	2,00	2,09	2,22	2,32	2,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,77	4,97	5,29	5,56	5,86
J	Informasi dan Komunikasi	1,24	1,20	1,17	1,13	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,51	1,51	1,53	1,56	1,62
L	Real Estat	1,07	1,07	1,08	1,10	1,11
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,28	2,39	2,50	2,59	2,71
P	Jasa Pendidikan	1,85	1,86	1,89	1,92	2,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,89	0,90	0,92	0,94	0,97
R,S,T, U	Jasa Lainnya	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* **Angka sementara**

** **Angka sangat sementara**

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Kontribusi terbesar pertama terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bintan adalah Kategori Industri Pengolahan yang mencapai 40,19 persen pada tahun 2017. Kategori Konstruksi, yang berperan terbesar kedua dalam pembentukan PDRB Bintan, menyumbang

17,60 persen pada tahun 2017. Kenaikan kontribusi pada kategori ini yaitu sebesar 0,44 persen. Hal ini berkaitan dengan pembangunan tower-tower listrik Batam-Bintan. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan Kategori Konstruksi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 12,50 persen pada tahun 2016 menjadi 9,54 persen pada tahun 2017. Pada Kategori Konstruksi masih banyak juga kegiatan pembangunan fisik konstruksi *multiyear* baik yang dibiayai oleh pemerintah dan investor swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan sarana publik dan prasarana publik dalam skala besar seperti pembangunan jembatan dan penambahan jalan beraspal di Kabupaten Bintan, pembangunan kawasan pelabuhan internasional di Berakit, pembangunan kawasan pariwisata di Lagoi, pembangunan beberapa hotel berbintang dan pembangunan fisik lainnya yang mampu memberi dampak besar pada penghitungan sektor ini dalam beberapa tahun terakhir.

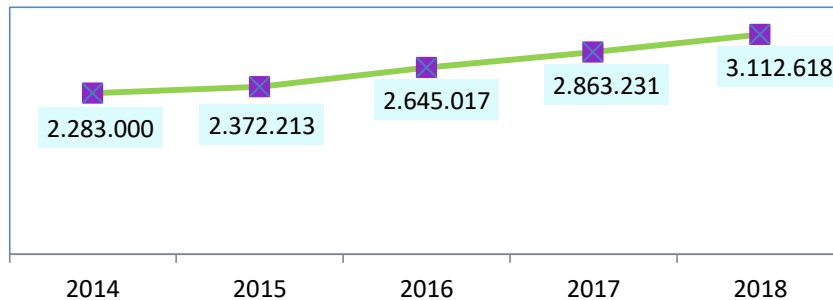
Sementara itu, kontribusi kelima belas kategori lainnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebesar 42,21 hingga 44,70 persen dengan kontributor terendah pada Kategori Jasa Perusahaan.

5.4 Upah Minimum Regional

Pekerja erat kaitannya dengan Upah Minimum Regional (UMR). Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup

pekerja lajang (belum menikah). Grafik dibawah ini menunjukkan perkembangan UMR Kabupaten Bintan.

**Grafik 5.4.1. Upah Minimum Regional (UMR)
Kabupaten Bintan 2014-2018**



Upah Minimum Regional (UMR) perlu juga diperhatikan karena merupakan balas jasa kepada para pekerja. UMR sendiri di Kabupaten Bintan terus mengalami peningkatan seiring dengan adanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Perkembangan sektor Konstruksi pada tahun terakhir yaitu tahun 2016 mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 sektor Konstruksi menjadi lapangan usaha dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bintan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan pembangunan fisik konstruksi baik yang dibiayai oleh pemerintah dan investor swasta, baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan sarana publik dan prasarana publik dalam skala besar seperti pembangunan jembatan dan penambahan jalan beraspal di Kabupaten Bintan, pembangunan kawasan pelabuhan internasional di Berakit, pembangunan kawasan pariwisata di Lagoi, pembangunan beberapa hotel berbintang dan pembangunan fisik lainnya yang mampu memberi dampak besar pada penghitungan sektor ini dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, pertumbuhan kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, juga cukup baik, kategori ini erat kaitannya dengan pariwisata, meningkatnya jumlah wisatawan manca negara serta domestik ke Kabupaten Bintan yang disertai meningkatnya angka hunian kamar

setiap tahunnya memberi dampak positif bagi pertumbuhan kategori ini.

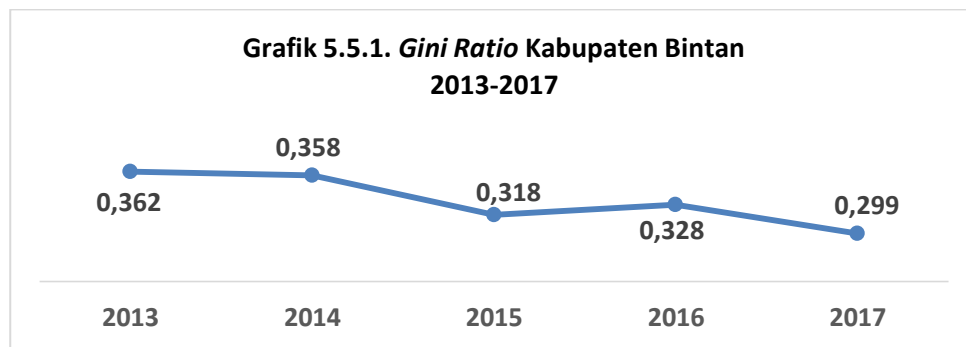
5.5 Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu daerah tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas sebagai proksi pendapatan. Beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*), dan ukuran Bank Dunia.

Indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu negara adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*). Koefisien Gini dapat digambarkan dalam bentuk kurva, yang disebut dengan Kurva Lorenz. Apabila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah yang diarsir akan bernilai nol (daerah tersebut sama dengan garis diagonal), sehingga nilai koefisien sama dengan nol. Apabila hanya satu pihak saja yang menerima pendapatan maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga,

sehingga nilai koefisien sama dengan satu. Pada Grafik 5.5.1 dibawah ini disajikan *Gini Ratio* Kabupaten Bintan pada tahun 2013-2017.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

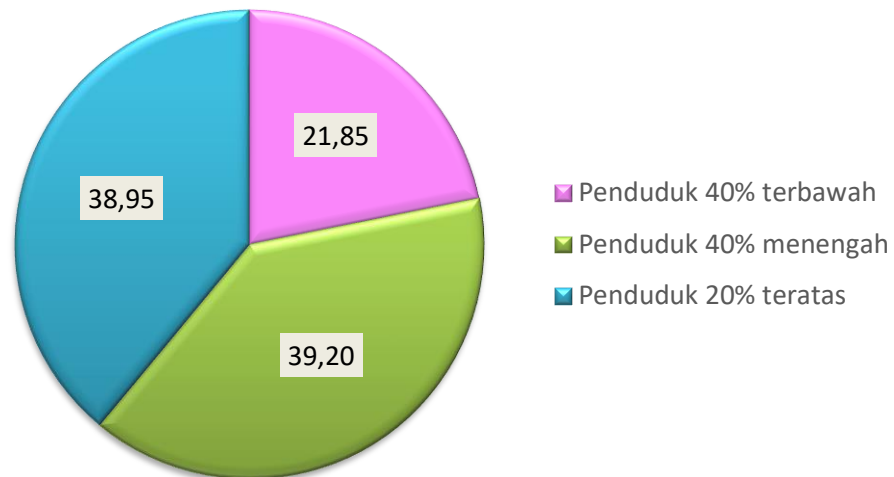
Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bintan sangat terlihat hingga tahun 2014 dengan Rasio Gini sebesar 0,358. Tetapi setelah itu, ketimpangan, secara perlahan menunjukkan penurunan hingga pada tahun 2017 Rasio Gini sebesar 0,299.

Dalam menilai distribusi pendapatan nasional terdapat cara lain disamping perhitungan Koefisien Gini, yaitu dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia (*World Bank*). Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan : 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Ketimpangan dikategorikan tinggi apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen. Ketimpangan dikategorikan sedang bila proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dan dikategorikan rendah bila proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori

40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen. Pada Grafik 3.5.2 ini disajikan distribusi pengeluaran penduduk Kabupaten Bintan.

Grafik 5.5.2. Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Bintan 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran di Kabupaten Bintan pada tahun 2017 tergolong kategori rendah. Hanya sekitar 61,05 persen pengeluaran perkapita yang dikeluarkan oleh penduduk 40 persen menengah dan 40 persen terbawah, selebihnya sebanyak 38,95 persen dikeluarkan oleh 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas.

Pola pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pergeseran pola pengeluaran dapat terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Kondisi ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi

makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung.

Tabel 5.5.1 Persentase dan Nilai Nominal Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bintan, 2017

Jenis Pengeluaran		Persentase (%)	Nilai (Rp)
(1)		(2)	(3)
Makanan		53,41	596 636,03
1.	Padi-padian	5,72	63 893,00
2.	Umbi-umbian	0,50	5 568,96
3.	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7,73	86 320,96
4.	Daging	2,39	26 705,12
5.	Telur dan Susu	3,75	41 867,47
6.	Sayur-sayuran	4,86	54 308,76
7.	Kacang-kacangan	1,04	11 662,37
8.	Buah-buahan	2,29	25 633,82
9.	Minyak dan Lemak	1,58	17 697,64
10.	Bahan Minuman	2,14	23 862,97
11.	Bumbu-bumbuan	1,41	15 733,69
12.	Konsumsi Lainnya	1,55	17 328,99
13.	Makanan dan Minuman Jadi	13,49	150 671,00
14.	Tembakau dan Sirih	4,96	55 380,79
Bukan Makanan		46,59	520 555,00
15.	Perumahan	25,94	289 755,08
16.	Aneka Barang dan Jasa	10,43	116 495,94
17.	Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	3,83	42 810,06
18.	Barang Tahan Lama	2,75	30 715,03
19.	Pajak, Pungutan dan Asuransi	2,31	25 777,46
20.	Keperluan Pesta dan Upacara	1,34	15 002,50
Jumlah		100,00	1 117 191,03

Sumber : BPS Kabupaten Bintan

Dari Tabel 5.5.1 diatas terlihat bahwa secara umum persentase pengeluaran per kapita penduduk banyak digunakan untuk mengkonsumsi makanan. Adapun lima besar pada konsumsi makanan adalah makanan dan minuman jadi (25,25 persen), ikan/udang/cumi/kerang (14,47 persen), padi-padian (10,71 persen), tembakau dan sirih (9,28 persen), serta sayur-sayuran (9,10 persen). Kontribusi kelima jenis pengeluaran tersebut sekitar 68,81 persen terhadap total pengeluaran makanan.

Sementara itu, pola pengeluaran per kapita penduduk sebulan juga didominasi oleh pengeluaran non makanan, yakni untuk perumahan sebesar 55,66 persen dan aneka barang dan jasa sekitar 22,38 persen, masing-masing dari total pengeluaran non makanan. Kontribusi keduanya bahkan mencapai 78,04 persen pengeluaran non makanan. Sedangkan sumbangan terkecil pada pengeluaran non makanan disokong oleh keperluan pesta dan upacara.

5.6 Pariwisata

Pariwisata memainkan peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Bintan. Pariwisata adalah sebuah rangkaian simbiosis mutualisme berbagai sektor ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti sektor kerajinan, restoran, agen perjalanan wisata, bahkan pertanian sebagai penyedia bahan baku makanan. Dirjen Pariwisata telah memutuskan klasifikasi hotel berdasarkan fasilitas layanan yang diberikan. Kabupaten Bintan memiliki sarana akomodasi seperti disajikan pada Tabel 3.6.1 di bawah ini :

**Tabel 5.6.1 Jumlah Perusahaan/Usaha
Akomodasi Menurut Klasifikasi Bintang dan Non
Bintang di Kabupaten Bintan, 2017**

Kecamatan	Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	Jumlah
Teluk Bintan	1	-	1
Bintan Utara	-	4	4
Teluk Sebong	17	-	17
Seri Kuala Lobam	-	-	-
Bintan Timur	-	3	3
Gunung Kijang	8	4	12
Mantang	-	-	-
Bintan Pesisir	-	-	-
Toapaya	1	-	1
Tambelan	-	-	-
Jumlah	27	11	38

Sumber: BPS Kabupaten Bintan

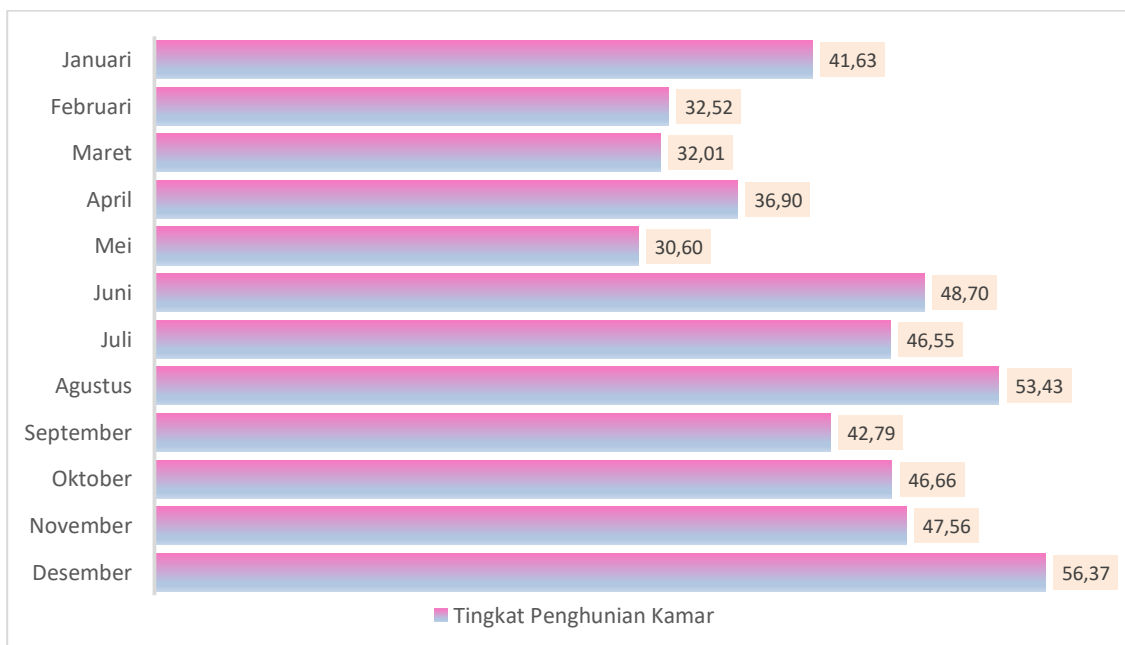
Pada Tabel 5.6.1. dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana akomodasi lebih banyak berada di Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong. Ketertarikan investor di area ini lebih tinggi karena sepanjang pesisir pantai di Gunung Kijang dan Teluk Sebong memiliki keindahan panorama laut yang menarik sehingga lebih mudah untuk memasarkan atraksi wisata kepada wisatawan. Kemudahan akses menuju Kecamatan Gunung Kijang, baik dari Kota Tanjungpinang maupun pelabuhan lainnya di wilayah Kabupaten Bintan menjadikan kawasan ini lebih mudah dijangkau pengunjung/wisatawan terutama wisatawan domestik.

Kawasan Lagoi yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Sebong adalah area dimana banyak hotel berbintang yang menyediakan jasa akomodasi. Kawasan ini didukung dengan adanya pelabuhan yang dapat langsung menerima kunjungan wisatawan dari negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu dibanding wisatawan domestik jumlah tamu yang banyak menginap di kawasan ini didominasi oleh

wisatawan mancanegara. Selama tahun 2017 telah terdapat 27 (dua puluh tujuh) hotel berbintang di kawasan Lagoi, tetapi tidak menyurutkan investor untuk membangun hotel atau fasilitas akomodasi lainnya di kawasan ini, karena pada 2016-2017 pembangunan objek wisata di Lagoi masih terus dilakukan, yang tentu saja hal ini memberikan nilai tambah untuk menarik wisatawan.

Selain jumlah hotel, TPK atau Tingkat Penghunian Kamar merupakan indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sektor pariwisata. Tingkat Penghunian Kamar menggambarkan kondisi banyaknya kamar yang digunakan oleh tamu. Persentase berapa tamu yang menggunakan fasilitas kamar yang ada di suatu jasa akomodasi dapat menunjukkan tingkat hunian. Selama 2017, TPK bulanan di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Grafik 5.6.1.

Grafik 5.6.1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten Bintan Menurut Bulan, 2017



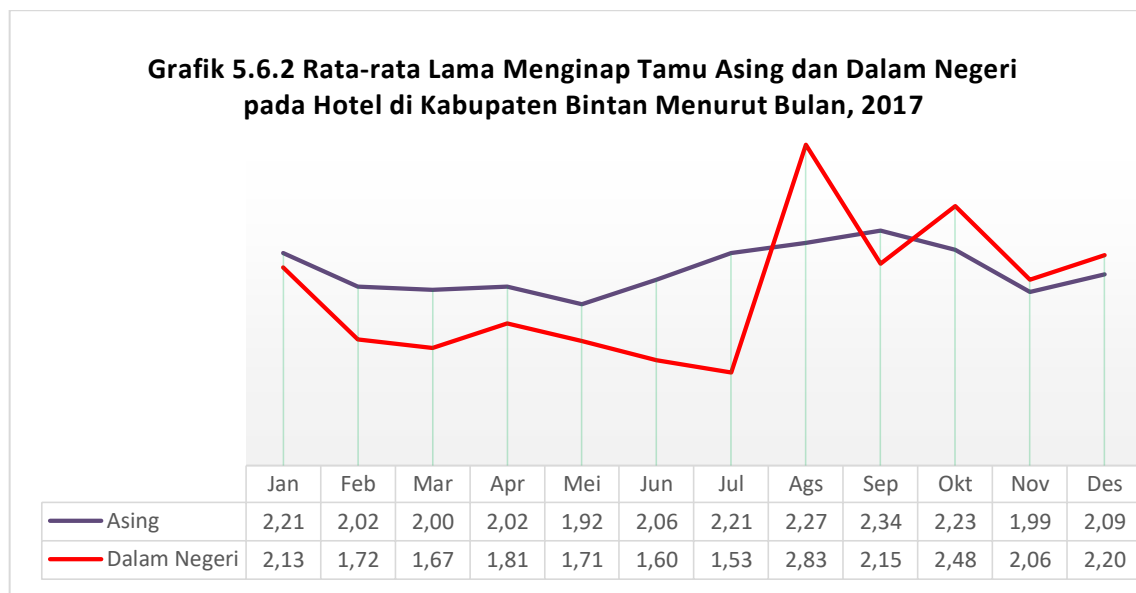
Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Pada grafik di atas terlihat bahwa TPK tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu sebesar 56,37 persen dan terendah sebesar 30,60 persen pada Mei 2017. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan yang

menginap di hotel paling banyak pada bulan Desember karena hotel-hotel tersebut selalu mengadakan *event* khusus setiap akhir tahun.

Untuk mengukur berapa lama tamu bermalam pada hotel di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada Grafik 5.6.1. Pada grafik tersebut terlihat bahwa tamu dalam negeri lebih lama menginap di hotel pada Agustus 2017 yaitu selama 2,83 malam. Kondisi ini dapat terjadi karena pada bulan tersebut bertepatan dengan musim libur anak sekolah.

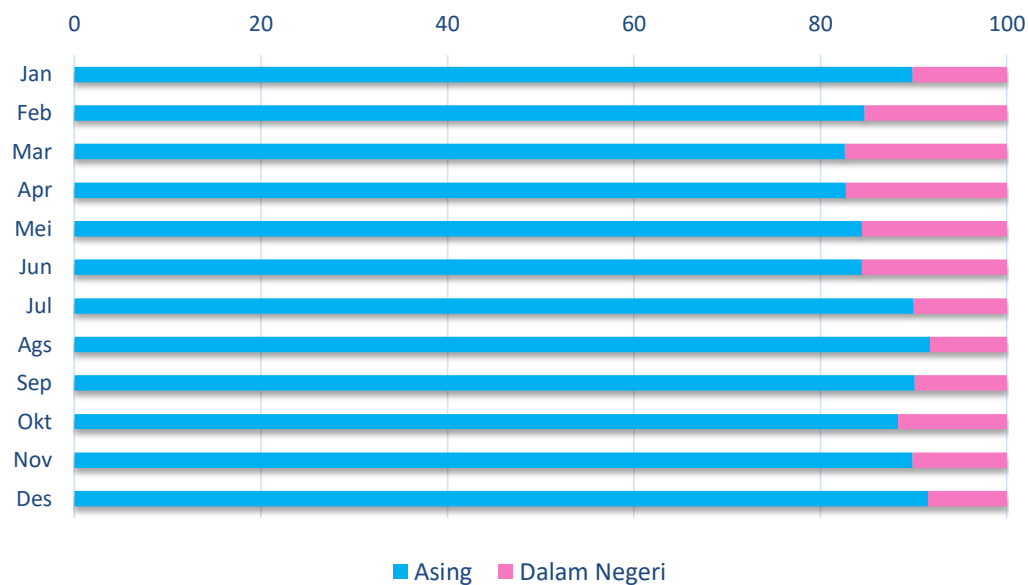
Rata-rata lama menginap di hotel terendah untuk gabungan tamu asing dan dalam negeri terjadi pada Mei 2017 sebesar 3,63 malam. Pada grafik terlihat pula bahwa tamu asing menginap di hotel lebih lama pada pertengahan-akhir tahun dibanding awal tahun.



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Kawasan Lagoi yang menjadi andalan pariwisata di Kabupaten Bintan menjadi destinasi utama bagi wisatawan mancanegara karena memiliki beragam atraksi wisata yang ditawarkan. Wisatawan asing yang berkunjung ke Bintan paling banyak adalah dari Singapura dan Tiongkok yang berkontribusi separuh (51,30 persen) dari total wisatawan asing. Jumlah wisatawan Singapura dan Tiongkok tersebut masing-masing sebesar 106.902 orang dan 82.190 orang selama tahun 2017.

Grafik 5.6.3 Persentase Jumlah Tamu Asing dan Dalam Negeri pada Hotel di Kabupaten Bintan Menurut Bulan, 2017



Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Selama 2017, di Kabupaten Bintan tercatat persentase tamu asing jauh lebih tinggi dibanding tamu dalam negeri. Dapat disimpulkan bahwa minat wisatawan mancanegara lebih besar untuk menginap di Bintan dibanding wisatawan domestik. Kondisi ini disebabkan akses bagi wisatawan luar negeri ternyata lebih mudah, yaitu dari pelabuhan Lagoi dengan berbagai fasilitas kemudahan *entry country*, sedangkan wisatawan domestik hanya bisa akses kawasan wisata ini melalui jalur darat dengan waktu tempuh yang cukup lama.

Di sisi lain Grafik 5.6.2 juga mengindikasikan bahwa Bintan telah menjadi tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara. Kondisi ini tentu berdampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata khususnya dan perekonomian secara umum. Kunjungan wisatawan mancanegara sangat berpengaruh pada devisa negara dan pendapatan asli daerah. Disamping itu, tentu saja memberikan nilai ekonomis pada sektor-sektor yang berhubungan dengan jasa pariwisata, misalnya petani penyedia kebutuhan buah lokal, pengusaha travel, dan sebagainya. Mengingat pariwisata adalah “*circle business*” yang mengakomodasi berbagai sektor seperti transportasi, energi, pertunjukan budaya dan

lain-lain yang saling terikat dan saling membutuhkan. Hal tersebut tentunya berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja dimana pasti membutuhkan banyak tenaga terampil untuk sektor yang padat karya ini.

5.7 Ekspor dan Impor

Selama tahun 2017 nilai ekspor dari Kabupaten Bintan telah mencapai US\$ 295,31 juta dengan volume sebesar 60,77 ribu ton barang ekspor. Pengiriman ke luar negeri dari Kabupaten Bintan rata-rata per bulan pada tahun 2017 sebesar US\$ 24,60 juta. Sementara itu, impor ke Kabupaten Bintan selama tahun 2017 secara total mencapai US\$ 1,23 miliar dengan rata-rata per bulan sebesar US\$ 103,02 juta.

Kegiatan ekspor dan impor di Kabupaten Bintan melalui 3 pelabuhan yaitu, Pelabuhan Bandar Seri Udana (Lobam) di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, dan Pelabuhan Sri Bayintan (Kijang) Kecamatan Bintan Timur. Pelabuhan Lobam berada di kawasan industri Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Pelabuhan tersebut merupakan fasilitas yang disediakan BIIE untuk menunjang kelancaran produksi perusahaan-perusahaan industri di kawasan tersebut. Secara umum, ekspor lebih banyak melalui pelabuhan Lobam sedangkan impor melalui pelabuhan Tanjung Uban. Hampir seluruh impor migas yang masuk ke Kabupaten Bintan melalui pelabuhan Tanjung Uban dimana terdapat terminal BBM dan Gas LPG milik PT. Pertamina (Persero) di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara.

**Tabel 5.7.1. Ekspor Kabupaten Bintan Menurut Negara Tujuan
Tahun 2017**

Negara Tujuan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Singapura	58 021 976,69	278 754 302,01	94,39
Tiongkok	211 992,90	1 067 760,33	0,36
Amerika Serikat	62 429,61	296 044,43	0,10
Australia	7 131,40	276 085,15	0,09
Malaysia	413 545,03	1.534 224,54	0,52
Inggris	32 225,70	181 865,81	0,06
Meksiko	8 066,34	30 843,47	0,01
Lainnya	2 015 742,02	13 172 986,22	4,46
Jumlah	60 773 109,68	295 314 111,96	100

Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Singapura tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor Kabupaten Bintan tahun 2016 dan 2017, dengan menyerap pangsa ekspor 93,74 persen pada 2016 serta 94,39 persen pada 2017. Hal ini disebabkan sebagian besar perusahaan industri yang ada di Kabupaten Bintan merupakan cabang dari perusahaan yang ada di Singapura, disamping Singapura merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Pada 2017, komoditas ekspor terbesar adalah mesin/peralatan listrik dengan persentase 64,90 persen. Selain itu, komoditas yang diekspor melalui kabupaten Bintan adalah karet dan barang dari karet, mesin-mesin/pesawat mekanik, benda-benda dari besi dan baja, lokomotif dan peralatan kereta api, bahan bakar mineral, plastik dan barang dari plastik, ikan dan udang, perangkat optik, dan sebagainya.

**Tabel 5.7.2. Impor Kabupaten Bintan Menurut Negara Asal
Tahun 2017**

Negara Tujuan	Volume (Kg)	Nilai (US\$)	Pangsa (%)
Singapura	746 137 940	533 640 276	43,16
Uni Emirat Arab	414 007 613	198 105 163	16,02
Malaysia	215 165 421	124 415 083	10,06
Saudi Arabia	178 174 378	99 904 772	8,08
Qatar	72 682 164	40 282 039	3,26
Jepang	443 323	36 396 616	2,94
Nigeria	44 904 000	18 028 966	1,46
Korea Selatan	56 207	7 722 716	0,62
Amerika Serikat	510 409	21 992 540	1,78
Tiongkok	8 832 312	10 425 489	0,84
Lainnya	201 911 253	145 385 541	11,76
Jumlah	1 882 825 020	1 236 299 201	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Bintan

Pada tahun 2017, hampir setengah total impor yang masuk ke Kabupaten Bintan berasal dari Negara Singapura. Impor Kabupaten Bintan selama tahun 2017 terbesar adalah Bahan Bakar Mineral (BBM) dengan nilai sebesar US\$ 984,93 juta atau sekitar 79,67 persen terhadap total nilai impor. Selain BBM, komoditas impor Kabupaten Bintan berupa mesin/peralatan listrik, berbagai produk kimia, mesin-mesin/pesawat mekanik, benda dari besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, besi dan baja, tembaga, perangkat optik, sari bahan samak dan celup, dan sebagainya.